

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan No: 244/G/2015/PTUN.Jkt
Dan Putusan No: 69/G/2016/PTUN.Jkt)**

SKRIPSI

Oleh:

ERIKSON SITORUS

201410115073



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeri Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.Jkt dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.Jkt

Nama Mahasiswa : Erikson Sitorus

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115073

Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Amelia Syauket

Dr. Amelia Syauket, SH., M.Si
NIP 1712304

Rahmat Saputra

Rahmat Saputra, SH., MH
NIP 011506039

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeri Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.Jkt dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.Jkt

Nama Mahasiswa : Erikson Sitorus
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115073
Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si
NIP 1712304

Rahmat Saputra, SH., MH
NIP 011606049

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeri Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.Jkt dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.Jkt

Nama Mahasiswa : Erikson Sitorus
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115073
Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018
MENGENAL,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH
NIP 010403011

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si
NIP 1712304

Penguji II : Rama Dhianty, SH., MH
NIP 011606056

MENGETAHUI

Ketua Program
Studi Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeri Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putuan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 16 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,



Erikson Sitorus
201410115073

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erikson Sitorus
NPM/NIP : 201410115073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeru Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putuan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT) Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 16 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Erikson Sitorus)

ABSTRAK

Erikson Sitorus. 201410115073. Skripsi. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeru Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putuan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT).

Putusan Pengadilan harus memuat argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan hukum termasuk hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada atau sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik. Untuk mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kesenjangan Hukum (*disparitas*) antara Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu meneliti dari bahan pustaka yang ada dan melihat gejala yang muncul dimasyarakat.

Hasil dari penelitian ini penulis menemukan kesenjangan hukum (*disparitas*) dari kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut. Dimana salah satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Kata Kunci, *Disparitas*, Putusan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Dosen Pembimbing :

Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si

Rahmat Saputra, SH., MH

ABSTRACT

Erikson Sitorus, 2014115073, Thesis, *The gap judicial decisions in the matter of employees civil servants proven to commit of corruption (analysis decisions number 244/G/2015/PTUN.Jkt and decision number 69 /G/2016/PTUN.Jkt.*

Judicial decisions shall contain argumentation or reason the judge in judicial consideration including court judge administrative may not solely on the basis of intuition or instink alone, but should be equipped with science law and should be based on the regulation that exist or appropriate azas-azas common good governance. To reaching a verdict who meet the sensi of justice for the parties and the general public. In this case researchers interested to scrutinize over the gap law (disparity) between the decision number 244/G/2015/PTUN.Jkt and decision number 69/G/2016/PTUN.Jkt by caout judge administrative Jakarta who checks and cut on the case.

This study uses normative research methods that examine the existing library materials and see the symptoms that appear in the community.

The result of this research the authors found the gap law (disparity) both judicial decisions state administrative are Jakarta. Which one judicial decisions administrative Jakarta is not in accordance whit legislative regulations.

Key words, disparity, of the country s judges jo supreme court decisions no, a state administrative court Jakarta

Adviesor :

Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si

Rahmat Saputra, SH., MH

KATA PENGANTAR

Segala Syukur dan punji hanya bagi Tuhan, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeru Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putuan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada Program P2k (Program Kelas Karyawan) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Kekhususan Ilmu Hukum. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Dalam kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum yang dengan kesibukannya tetapi tetap mampu menyempatkan diri untuk memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan petunjuk dan saran bagi terselesaikannya penulisan ini. Terima Kasih atas nasehat dan semangatnya.
3. Ibu Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si, Sebagai Dosen Pembing I yang dengan kesabaran, semangat dan antusias yang tiada henti untuk terus mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Rahmat Saputra, SH.,MH, Sebagai Dosen Pembing II yang terus menerus mengingatkan dan memberi motivasi agar skripsi dapat selesai tepat waktu.
5. Semua Staff Fakultas hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena hanya dengan kerja keras mereka lah proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara kampus Bekasi dapat terlaksana dengan baik.
6. Isteri dan anak saya tercinta Betsaida Anrayani Sitio, Alvaro Gabriel Sitorus, Ibu saya T. Nainggolan, Abang dan Kakak-Kaka saya semua keluarga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi buat saya selama penyusunan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Ibu Notaris Tioman Simanjuntak, SH yang selalu memberikan motivasi dan dorongan buat saya untuk menjadi seorang Sarjana Hukum, beserta rekan-rekan kerja saya dikantor Notaris.
8. Sahabat saya Bapak Samaruddin R Manullang, SH yang membantu saya untuk menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca,
Terima Kasih.

Bekasi, 19 Juli 2018



Erikson Sitorus

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Pelelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka konseptual dan kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teori	7
1.4.1.1 Grand Teori	7
1.4.1.2 Middle Teori	8
1.4.1.3 Applied Teori	8
1.4.2 Kerangka Koseptual	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Metode Penelitian	12

1.5.1	Jenis Penelitian	12
1.5.2	Metode Pendekatan	13
1.5.3	Sumber Data	13
1.5.4	Pengumpulan dan Pengolahan Data	14
1.5.5	Analisis Data	14
1.6	Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1	Tinjauan Tentang Kehakiman	18
2.1.1	Pengertian Hakim	18
2.1.2	Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim	19
2.1.3	Kewenangan Hakim	22
2.2	Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	22
2.2.1	Pengertian Putusan Hakim	22
2.2.2	Disparitas dan Faktor yang Mempengaruhi Disparitas	23
2.3	Tinjauan Tentang Aparatus Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil	29
2.3.1	Pengertian Pegawai Negeri Sipil	29
2.3.2	Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara	31
2.3.3	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil	31
2.3.4	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	32
2.4	Tinjauan Tentang Sengketa Tata Usaha Negara	34
2.4.1	Sengketa Kepegawaian	35
2.4.2	Proses Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	36
	2.4.2.1 Upaya Administratif sesuai PP No. 53 Tahun 2010	36
	2.4.2.2 Prosedur dan Tata Cara Keberatan	39
	2.4.2.3 Prosedur dan Tata Cara Banding Administratif	40
	2.4.2.4 Gugatan Melalui Peradilan TUN	42
2.5	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	42
BAB III HASIL PENELITIAN		
3.1	Hasil Penelitian Putusan No. 244/G/2015/PTUN.Jkt	45
3.1.1	Para Pihak	45
3.1.2	Objek Gugatan	45
3.1.3	Kasus Posisi	45
3.1.4	Pembuktian Para Pihak	50
3.1.5	Saksi-saksi	59

3.1.6	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	60
3.1.7	Diktum Putusan Hakim	64
3.2	Hasil Penelitian Putusan No. 69/G/2016/PTUN.Jkt	65
3.2.1	Para Pihak	65
3.2.2	Objek Gugatan	65
3.2.3	Kasus Posisi	65
3.2.4	Pembuktian Para Pihak	71
3.2.5	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	78
3.2.6	Diktum Putusan Hakim	99

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1	Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Nomor 244/G/2015/PTUN.Jkt dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.Jkt .	101
4.2	Proses Penyelesaian Sengketa Kepegawaian yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Negera Republik Indonesia /.....	121

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	127
5.2	Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

MOTTO

“KUATKAN DAN TEGUHKAN HATIMU DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, BERTINDAKLAH HATI-HATI SESUAI DENGAN SELURUH HUKUM YANG TELAH DIPERINTAHKAN KEPADAMU, DAN JANGANLAH MENYIMPANG KE KANAN ATAU KE KIRI SUPAYA ENKAU BERUNTUNG KEMANA PUN ENKAU PERGI”.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti / Keterangan
UU	Undang-Undang
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PP	Peraturan Pemerintah
BAPEK	Badan Pertimbangan Kepegawaian
<i>A quo</i>	Perkara ini



DAFTAR LAMPIRAN

Copy Putusan No : 244/G/2015/PTUN.Jkt dan Putusan No. 69/G/2016/PTUN.Jkt

Bukti Pengajuan Permohonan Informasi

Surat Permohonan Data No. B/273/III/2018/FH-UBJ

Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1

Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 2

Surat Tugas Melaksanakan Tugas Sebagai Pembimbing

